

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PENYULUHAN KESEHATAN DI PEDESAAN MEMANFAATKAN FORUM KOMUNIKASI WARGA MELALUI WHATSAPP GROUP

Development Of Information Systems And Health Extension In The Countryside Utilizing Citizen Communication Forums Through Whatsapp Group

Metha Madonna

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak juga surut bahkan cenderung meningkat kembali, seperti di akhir Mei 2021 terdapat 1.821.703 positif dengan jumlah kematian mencapai 50.578 orang. Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan minimnya pengetahuan, penanganan lambat serta pengabaian protokol kesehatan di masyarakat adalah pemicunya. Penanganan Covid-19 tidak dapat dilakukan Pemerintah hanya sendiri tapi harus holistik dan menyeluruh, serta keterlibatan setiap warga masyarakat diperlukan guna mengimplementasikan setiap program atau strategi penanganan pandemi. Artikel ini bertujuan mengkaji pembentukan Forum Komunikasi Warga Desa (FKWD) yang memanfaatkan perangkat telekomunikasi digital, mengingat urgensinya dalam penyebaran informasi dan penyuluhan kesehatan. Metode penelitian digunakan *systematic review* yang merujuk pada jurnal buku, berita dan lainnya. Hasil dan kesimpulan Adapun FKWD memiliki fungsi sebagai berikut: mengkomunikasikan kondisi keamanan atau Satgas Desa dari Covid-19, pertukaran informasi antar warga terkait sosialisasi penegakan protokol kesehatan serta kampanye ajakan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional.

Kata kunci: Forum Komunikasi Warga, penyuluhan kesehatan, sistem informasi.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic in Indonesia did not recede and even tended to increase again, as at the end of May 2021 there were 1,821,703 positive with the number of deaths reaching 50,578 people. Task Force handling Covid-19 in the field of behavior change and the Committee on Handling Covid-19 and National Economic Recovery (KPCPEN) stated that lack of knowledge, slow handling and neglect of health protocols in the community were the triggers. Handling Covid-19 cannot be done by the Government alone but must be holistic and thorough, and the involvement of every citizen is needed to implement every pandemic management program or strategy. This article aims to review the establishment of a Community Communication Forum (FKWD) that utilizes digital telecommunication devices, given its urgency in the dissemination of information and health counseling. Research methods are used systematic review which refers to journal books, news and others. The results and conclusions of FKWD have the following functions: communicating security conditions or Village Task Force from Covid-19, exchange of information between citizens related to socialization of health protocol enforcement and invitation campaigns to the public to participate in national vaccination programs.

Keywords: Citizen Communication Forum, health counseling, information systems.

PENDAHULUAN

Penyebaran informasi dan penyuluhan kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 menjadi agenda utama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional namun bidikannya bukan saja masyarakat perkotaan atau wilayah metropolitan tapi juga warga pedesaan serta daerah pinggiran lain yang berpotensi terjangkit pandemi. Pengetahuan dan informasi minim terkait karakteristik virus corona yang diterima masyarakat berdampak pada pengabaian penerapan Protokol kesehatan (Protkes) terkait kepatuhan Menggunakan masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun (3M), serta penanganan yang lamban bagi penderita, ditambah dengan sikap merasa kebal akibat sudah melaksanakan vaksinasi menjadi faktor penyebab tak berakhirnya pandemi di Tanah Air (Wahyuni, 2021).

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi menyatakan bahwa pentingnya mengubah perilaku masyarakat guna meningkatkan pertahanan kesehatan masyarakat sehingga dapat mencegah dan mengurangi resiko tertular Covid-19. Dengan demikian ada empat strategi yang bisa dilakukan dalam menghadapi pandemi yakni satu dengan cara memberikan informasi terkait bahaya virus tersebut sebanyak dan seluas-luasnya, selanjutnya kedua melakukan penyebaran informasi berulang (stimultan). Ketiga mendorong kebijakan yang mampu menggerakkan orang agar mau menerapkan protokol kesehatan dengan mendorong strategi intensif serta keempat adanya pembinaan atau sanksi.

Jadi untuk menangani permasalahan pandemi Covid-19 ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa hanya pemerintah saja, akan tetapi diperlukan seluruh *stakeholder* dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat terlaksana penanganan pandemi yang efektif. Penanganan secara holistik dan menyeluruh tidak hanya melibatkan masyarakat di perkotaan saja akan tetapi juga termasuk warga pedesaan yang belum mendapatkan informasi virus tersebut secara optimal, dengan demikian dapat meningkatkan kewaspadaan diri dan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Pedesaan dan wilayah di luar kota metropolitan patut diberikan perhatian mengingat masih rendahnya literasi masyarakat desa akan bahaya Covid-19, penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu pembuatan poster dan video pencegahan Covid-19, melakukan penyuluhan terhadap warga, pembagian alat pelindung diri dan sebagainya. Sedangkan untuk metode dapat dilakukan dengan cara edukasi, sosialisasi dan evaluasi program tersebut, sehingga dapat disimpulkan penanganan Covid-19 terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan cara pendekatan langsung dan itu bisa dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah desa dengan demikian bisa terlihat dimana pencegahan yang belum maksimal (Lubis et al., 2020).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mengedukasi ke masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan diperlukan beberapa tahap dan sifatnya tidak hanya sesekali saja. Adapun tahapan yang dimaksud yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat desa akan bahayanya Covid-19 dengan cara pembuatan dan penempelan poster di tempat-tempat umum, kemudian dibagikan alat pelindung diri kepada masyarakat dan memberikan pemahaman ke masyarakat akan bahaya Covid-19 dan itu semua dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung atau tatap muka. Selain itu edukasi penting dilakukan mengingat

masyarakat desa lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti ke ladang, ke sawah, ke pasar atau ke tempat umum lainnya.

Penyebaran Covid -19 transmisi antar individu yang terjadi pada saat interaksi di fasilitas umum seperti di angkutan umum, pasar serta sarana layanan publik lainnya, dimana berbagai kegiatan yang bersifat terjadinya pengumpulan massa. Termasuk pada saat mudik lebaran beberapa tahun lalu telah terjadi mobilisasi massa secara besar-besaran dan menjadi tuduhan bahwa pemicu melonjaknya kembali kasus Covid -19 pada saat Idul Fitri 1441 Hijriyah (2020) lalu yang mencapai kenaikan 65,55 persen, meskipun jika dibandingkan usai Idul Fitri 1442 Hijriyah (2021) mengalami penurunan yaitu mencapai 56,60 persen dan kenaikan tersebut trendnya lebih banyak di daerah. Tahun 2020 tercatat Jawa Tengah naik 368 persen, Sulawesi Selatan naik 280 persen, Kalimantan Selatan 99 persen, Jawa Timur naik 45,36 persen dan DKI Jakarta naik 33,2 persen. Sedangkan tahun 2021 ada lima provinsi yang mengalami penambahan kasus positif tertinggi setelah Idul Fitri seperti Jawa Tengah naik 103 persen, Kepulauan Riau naik 103 persen, Riau naik 69 persen dan DKI Jakarta naik 49,5 persen dan Jawa Barat naik 25 persen (Murdiyatomoko, 2021).

Perlunya keterlibatan warga masyarakat seperti lingkungan terkecil misalnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), menjadi sangat penting dalam rangka antisipasi dan pengawasan transmisi. Karenanya selain mengaktifkan peran aparat keamanan dan perangkat desa, Satgas Penanganan Covid-19 mengharap partisipasi warga dengan pembentukan forum komunikasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Kehadiran TIK dalam wujud perangkat telekomunikasi digital seperti *handphone smatphone*, *android* dan sejenisnya, bukan lagi sesuatu yang asing bagi warga pedesaan. Tercatat untuk saat ini sudah banyak warga desa yang menggunakan gadget untuk memenuhi kebutuhan informasinya (Sunarsi et al., 2015).

Pembentukan Forum Komunikasi Warga Desa (FKWD) yang memanfaatkan media sosial WhatsApp Group (WAG) sebagai salah satu produk TIK, sangat menarik untuk dikaji terkait dengan pembangunan sistem informasi dan penyuluhan kesehatan di pedesaan. Sebagaimana kerja keras Pemerintah menggenjot pembangunan desa dengan optimalisasi sistem komunikasi dan penyuluhan pertanian lewat forum media, maka hal yang sama pastinya dapat diterapkan pada sektor kesehatan (Laksono et al., 2011). Maka berdasarkan latar belakang tersebut masalah selanjutnya yang perlu dikaji dan perlu dijawab dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana penerapan sistem informasi dan penyuluhan kesehatan di pedesaan memanfaatkan forum komunikasi warga melalui WAG?". Tujuan penelitian mengkaji sistem berikut implementasi penyebaran komunikasi informasi dan penyuluhan kesehatan di pedesaan dengan berbasis TIK.

METODE

Penelitian mengenai sistem informasi dan penyuluhan kesehatan di pedesaan memanfaatkan forum komunikasi warga dengan menggunakan *systematic review* yang merupakan sebuah metode yang menggunakan review, telaah, evaluasi, terstruktur, pengklasifikasian serta pengkategorian yang merupakan dari hasil pembuktiaan sebelumnya. Adapun langkah dan strategi pelaksanaannya sangat terencana, terstruktur sehingga metode mempunyai perbedaan dengan metode lainnya yang hanya sekadar menyampaikan studi literatur (Hariyati, 2010). Penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dengan para responden tapi cukup dengan memeriksa dan menelaah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian dan data tersebut diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Selain data dalam sebuah penelitian literatur juga memerlukan rumusan masalah, landasan teori, analisis data dan pengambilan kesimpulan (Melfianora, 2019)

Teori yang digunakan yaitu teori determinisme teknologi yang merupakan turunan dari determinisme dimana melihat teknologi dari segi materialnya saja, teknologi dipandang sebagai alat yang di dalam penggunaannya ditentukan oleh manusia, selain itu manusia ditempatkan sebagai faktor utama di dalam perubahan sosial. Namun di sisi lain ada juga yang berpendapat baik secara langsung maupun tidak langsung teknologi menjadi penggerak utama perubahan sosial, diakui atau tidak teknologi mempunyai kaitan erat dengan kehidupan manusia, secara teoritis mereka meyakini determinisme teknologi dapat dikelompokkan menjadi kaum optimis dan pesimis (Ratmanto, 2005).

PEMBAHASAN

1. Sistem Komunikasi Pembangunan masyarakat Pedesaan.

Sistem komunikasi pembangunan memiliki beberapa fungsi di antaranya sebagai penyebar informasi, pendukung interaksi sosialisasi dan penyuluhan serta menjalin kedekatan (*interested*) dalam sebuah kehidupan sosial. Fungsi penyebaran informasi dan maupun fungsi sosialisasi atau penyuluhan merupakan elemen vital dalam mensukseskan segala program dan strategi pembangunan nasional. Sehingga bisa dikatakan peran komunikasi sangat penting di dalam pembangunan, meskipun dalam penerapannya komunikasi harus disesuaikan dengan fungsi dan tujuannya yang lebih mengarah ke tugas-tugas penting bagi kebutuhan hidup serta menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan begitu juga sebaliknya maka pembangunan yang direncanakan bersama antara pemerintah dengan masyarakat akan berjalan dengan baik dan saling memberi manfaat yang positif sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat (Zahara, n.d.).

Pembangunan di pedesaan tentunya dipengaruhi oleh perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dimana setiap warga desa berhak mendapatkan informasi dengan baik guna menunjang kelangsungan hidupnya dan ini diimplementasikan dalam Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana tertuang dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86 mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan yang menyebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Terdapat perbedaan signifikan antara sistem komunikasi di pedesaan dengan perkotaan utamanya dalam hal dukungan sarana dan prasarana berbasis TIK. Diantaranya belum terpasangnya menara *Base Transceiver Station* (BTS) secara ke seluruh penjuru negeri letak geografis tak terjangkau satelit, padahal masih banyak wilayah di Tanah Air belum dapat menikmati internet. Masih ada 7.904 desa dan kelurahan lainnya di wilayah Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T), berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang bersambung ke dalam jaringan 4G dan selanjutnya ditargetkan akan ada 4.200 menara BTS yang akan dibangun, tahun ini di wilayah 3T dan sementara 3.704 lainnya akan diselesaikan di tahun 2022 (A. Rizal, 2021).

Pada saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan, hal ini dikarenakan akses internet untuk saat ini sudah diakses di berbagai daerah. Meskipun demikian masih sedikit yang memanfaatkan internet bahkan berdasarkan sebuah penelitian di Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi bahwa telah terjadi digital *dividen* pada masyarakat pengguna TIK dan laki-laki lebih mendominasi jika dibandingkan dengan pengguna perempuan. Selain itu pengguna internet lebih banyak digunakan oleh anak usia sekolah dan kalangan muda. Hal ini menunjukkan program internet masuk desa telah membuka akses informasi dan komunikasi masyarakat dan menjadi sarana

belajar mengenal internet namun pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi dan informatika menunjukkan belum maksimal dimanfaatkan (Subiakto, 2008).

Di sisi lain pihak pemerintah terus berupaya mengatasi keterbatasan terus dengan mengembangkan pelebaran jejaring internet melalui program tol langit dimana ditegaskan pihak pemerintah tidak hanya akan bergantung pada operator, karena pihak pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk fokus pada pembangunan dan menyiapkan fasilitas internet guna mendukung di sektor pendidikan, kesehatan maupun pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan sudah beroperasinya Palapa Ring Barat dan Tengah dan saat ini tengah diselesaikan Ring Timur. Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menjanjikan bahwa pemerintah akan menyediakan internet dengan kecepatan tinggi untuk digunakan di sekolah, Puskesmas, kantor desa, kantor Polsek, Koramil dan instansi lainnya (Kominfo.go.id, 2019).

Begitu juga dalam kultur berkomunikasi, masyarakat pedesaan masih lebih menggunakan komunikasi interpersonal dalam wujud tatap muka. Pertemuan langsung dalam bentuk silaturahmi antar keluarga hingga forum sarasehan, kendurian dan sejenisnya jadi pilihan warga desa dalam berkomunikasi dibanding memanfaatkan media telekomunikasi. Komunikasi tatap muka akan membawa pengaruh terhadap masyarakat desa, seperti kepala desa yang berkomunikasi langsung terhadap warga dan berupaya memengaruhi warganya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Selain itu menurut Stewart L. Tube dan Sylvia Moss bahwa komunikasi tatap muka akan memperlihatkan efektifitas apabila menghasilkan lima hal yaitu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik dan tindakan (Lestari, 2015).

Namun saat pandemi berlangsung, bersamaan diterapkannya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), masyarakat pedesaan dipaksa beradaptasi dengan TIK dan perangkat teknologi digital. Berbondong-bondong orangtua belanja *smartphone*, *android*, *laptop* hingga *Personal Computer* (PC) secara tunai maupun kredit. Maka jumlah pengguna gadget di desa meningkat terlebih di saat ini tidak hanya orang dewasa, anak-anak di desa pun sudah menggunakan gadget di dalam kesehariannya seperti yang terjadi di Desa Wukirsari Imogiri Bantul banyak anak-anak memanfaatkan waktu luang mereka dengan bermain gadget (Aryati, 2017). Pergeseran interaksi tatap muka ke arah komunikasi virtual pada akhirnya terjadi juga pada masyarakat pedesaan. Meski belum seluruhnya warga desa memanfaatkan media digital, pada prakteknya telah berlangsung proses pertukaran informasi memanfaatkan TIK.

2. Sistem Informasi dan Penyuluhan Pedesaan

Penerapan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis TIK merupakan salah satu alat bantu bagi perangkat desa guna meningkatkan pelayanan terhadap warganya serta hal tersebut merupakan bagian dari implementasi *e-Government* sebagaimana yang tertuang dalam Amanat Inpres No.6 tahun 2001 tentang telematika dalam pemerintahan dan Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia, SID digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul ketika pengelolaan data desa seperti proses administrasi data desa maupun pengelolaan data surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa. Selain itu SID dapat digunakan oleh perangkat desa untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) (Rahmini et al., 2017).

3. Implementasi Pemanfaatan TIK di Pedesaan Terkait Pandemi.

Praktik komunikasi interpersonal pada masyarakat pedesaan dalam perspektif kultural dan humanisme tentunya patut dilestarikan. Namun pandemi dan ancaman virus corona

memaksa setiap warga masyarakat harus menegakkan protokol kesehatan yaitu Menggunakan Masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun (3M). Pertemuan tatap muka antar warga dalam format massal atau menimbulkan kerumunan itulah yang ditenggarai Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku sebagai wahana terjadinya transmisi atau penularan virus. Terjadinya transmisi besar-besaran kian terbuka saat perayaan hari-hari besar seperti lebaran, natal dan tahun baru. Kekhawatiran itulah alasan Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik pada tahun 2020 dan 2021 (J. G. Rizal, 2021). Kecenderungan kasus yang selalu meningkat pasca hari raya, memaksa Pemerintah melarang mudik disertai pengerahan aparat keamanan dari TNI dan Polri untuk melapis penerapan sterilisasi jalur-jalur mudik yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di setiap perbatasan antar daerah.

Namun demikian faktanya banyak pemudik yang berhasil lolos dari penjagaan yang ketat tersebut. Bukan saja disebabkan banyak jalan tikus atau jalan alternatif, tapi juga sejumlah persoalan lain seperti kolusi antara petugas dengan pemudik, pembuatan surat kerja keterangan palsu dan sebagainya. Khawatir kembali melonjak jumlah warga Jakarta yang terinfeksi Covid-19, maka Gubernur DKI, Anis Baswedan mengarahkan aparat keamanan, Dinas Kesehatan termasuk perangkat kelurahan, RW dan RT untuk aktif mengawasi mobilisasi warga. Ketua lingkungan setempat, baik RW/RT wajib memberikan laporan terkait keluar masuknya warga pendatang atau non KTP DKI.

Selanjutnya guna memperketat pengawasan dengan melibatkan partisipasi warga, maka dibentuk forum komunikasi warga memanfaatkan media sosial WhatsApp Group (WAG) yang di dalamnya melibatkan RW, RT, Satgas Penangan Covid setempat serta warga. Pemanfaatan WAG ini cukup membantu penyebaran informasi mengenai siapa saja warga yang mudik maupun pendatang. Berbekal informasi di WAG maka ketua lingkungan dan Satgas Covid setempat dapat melakukan pemeriksaan, isolasi mandiri berikut pengawasan. Forum komunikasi warga dalam upaya sosialisasi sekaligus literasi kesehatan masyarakat ini merujuk pada keberadaan forum media di bidang pertanian seperti yang terjadi di daerah Malang.

Di daerah Malang tersebut guna meningkatkan komunikasi penyuluh memanfaatkan WA agar dapat berkomunikasi dengan warganya dibawah dikoordinasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dwi Sumular, SP dan Dian Laili Novitasari Spt berinisiatip memanfaatkan komunikasi digital guna meningkatkan partisipasi penyuluh maupun petani dengan melalui pembentukan WhatsApp Group. Pemanfaatan komunikasi digital tersebut diadakan untuk berdiskusi, memantau dan memberikan pengarahan dan saran kepada para petani. Dimana para petani jika menemui kendala dapat mengutarakan di WAG untuk menjadi bahan diskusi baik antar petani maupun dengan penyuluh.

Sebagaimana peran dan fungsi forum media, forum komunikasi warga bertujuan memberdayakan masyarakat dalam upaya-upaya penegakkan protokol kesehatan, saling mengingatkan atas potensi terjadinya penularan di lingkungan setempat, penyebaran informasi kegawat-daruratan (*Early Warning System*) serta pengawasan bersama. Sedangkan pembentukan forum komunikasi warga untuk kesehatan yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI kepada warganya, merupakan sebuah bentuk adopsi meniru praktik pemanfaatan forum komunikasi petani pedesaan. Penyebaran virus corona bukan saja di kota-kota besar atau wilayah dengan aktivitas dan jumlah penduduk yang besar namun juga mulai menyentuh daerah luar Pulau Jawa termasuk pedesaan.

Urgensi pembentukan Forum Komunikasi Warga Desa (FKWD) memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp Group (WAG) didasarkan meningkatnya ancaman atau potensi penularan virus sementara kesadaran masyarakat desa terhadap pandemi masih rendah hal

ini dibuktikannya dengan masih banyak warga desa yang enggan menerapkan Potokol kesehatan. Di sisi lain FKWD ditujukan bagi segenap warga desa dengan melibatkan perangkat desa seperti Kepala Desa, Lurah, RW Kepala Dusun, RW dan RT. FKWD dapat diprakarsai penyuluh kesehatan maupun Satgas Covid-19 Desa yang sesungguhnya melaksanakan peran dan tugas dalam kepenyuluhan.

Tujuan dan manfaat FKWD berbasis media digital utamanya adalah mengkomunikasikan kondisi keamanan atau satgas desa dari Covid, pertukaran informasi antar warga terkait keberadaan pasien atau Orang Tanpa Gejala (OTG), sosialisasi penegakan protokol kesehatan serta kampanye ajakan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional. Partisipasi warga desa dalam FKWD melalui WAG diharapkan membangun proteksi mandiri di tingkat komunitas mikro, minimal terjadi saling konfirmasi dan maksimal terbangun literasi di masyarakat desa. Selanjutnya kesadaran dan tindakan perlindungan diri dan lingkungan yang ujungnya adalah kontribusi masyarakat pedesaan dalam menghambat transmisi penularan virus.

Pembentukan FKWD telah diimplementasikan di Desa Babelan Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana dijelaskan Petugas Satgas Covid-19, Wawan Destana yaitu pihaknya memanfaatkan teknologi informasi seperti WAG guna memonitoring aktivitas warga. Jika terdapat laporan masuk melalui WAG maka akan ditindaklanjuti mulai dari RT/RW kemudian diteruskan ke pihak Kecamatan, Polri, TNI dan Puskesmas. Pihak-pihak yang disebutkan tadi diupayakan masuk ke dalam FKWD berbasis internet tersebut, sangat bermanfaat sehingga dapat mengurangi jumlah kasus penularan dan korban, begitu juga monitoring pasien yang sudah terpapar dapat segera ditangani dengan baik dan tepat.

PENUTUP

Pembentukan Forum Komunikasi Warga Desa (FKWD) berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dalam hal ini memanfaatkan WhatsApp Group (WAG) merupakan salah satu bentuk penerapan digitalisasi penyuluhan kesehatan. FKWD ada menjadi solusi alternatif penyuluhan dan sosialisasi program kesehatan nasional ketika penyuluh harus menghindari pertemuan tatap muka langsung. Adapun FKWD memiliki fungsi sebagai berikut: mengkomunikasikan kondisi keamanan atau satgas desa dari Covid-19, pertukaran informasi antar warga terkait sosialisasi penegakan protokol kesehatan serta kampanye ajakan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati, T. (2017). Kontrol Sosial Orang Tua kepada Anak Balita dalam Penggunaan Gadget di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. *E-Societas*, 6. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/9111>
- Hariyati, R. T. S. (2010). Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 13(2). <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/242>
- Komingfo.go.id. (2019). Ini Perkembangan Program Tol Langit! *Komingfo.Go.Id*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/16602/ini-perkembangan-program-tol-langit/0/berita_satker#:~:text=Jakarta%2C%20Kominfo%20Setelah%20fokus%20membangun,akses%20internet%20di%20seluruh%20Indonesia.

- Laksono et al., A. D. (2011). Analisis Potensi Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Jejaring Sosial (Studi Kasus Pada 'Forum Jejaring Peduli Aids'). *Analisis Potensi Penyebaran Informasi Kesehatan*, 14, : 358–365. <https://media.neliti.com/media/publications/20976-ID-analisis-potensi-penyebaran-informasi-kesehatan-melalui-jejaring-sosial-studi-ka.pdf>
- Lestari, K. T. (2015). Efektifitas Komunikasi Tatap Muka Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Didesa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *Jurnal Sosial Universitas Merdeka Madiun*, 16, 114.
- Lubis et al., N. (2020). Gerakan Desa Sadar Bahaya Covid 19 : Pengabdian Pada Masyarakat Desa Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/3123>
- Melfianora. (2019). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur*. UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian. file:///C:/Users/USER/Downloads/KTI dengan Studi Literatur (1).pdf
- Murdiyatomoko. (2021). Kasus Covid-19 Pasca-Lebaran Lebih Baik dari Tahun Lalu, Jawa Tengah Tertinggi Nasional. *Suaramerdeka.Com*. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04171426/kasus-covid-19-pasca-lebaran-lebih-baik-dari-tahun-lalu-jawa-tengah-tertinggi-nasional?page=all>
- Rahmini et al., F. (2017). Selain itu SID dapat digunakan oleh perangkat desa untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan d. *Garuda Rujukan Digital*, 3. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1193676>
- Ratmanto, T. (2005). Determinisme Teknologi Dalam Teknologi Komunikasi dan Informasi. *Ejournal.Unisba.Ac.Id*. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/1175/728>
- Rizal, A. (2021). Demi Pemerataan Jaringan 4G, Kominfo Genjot Pembangunan Menara BTS. *Infokomputer.Grid.Id*. <https://infokomputer.grid.id/read/122623139/demi-pemerataan-jaringan-4g-kominfo-genjot-pembangunan-menara-bts>
- Rizal, J. G. (2021). Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku, Satgas minta tidak ada mudik lokal. *Kompas.Com*. <https://regional.kontan.co.id/news/larangan-mudik-lebaran-2021-berlaku-satgas-minta-tidak-ada-mudik-lokal?page=all>
- Subiakto, H. (2008). Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat. *Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga*. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkpa4d7ec1aaefull.pdf>
- Sunarsi et al., R. (2015). Pemanfaatan Handphone Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur. *Media.Neliti.Com*, 19, 57–67. <https://media.neliti.com/media/publications/123835-ID-pemanfaatan-handphone-pada-masyarakat-pe.pdf>
- Wahyuni, N. C. (2021). Epidemiolog: Klaster Covid-19 Marak karena Disiplin 3M Turun Drastis. *Beritasatu.Com*. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/769213/epidemiolog-klaster-covid19-marak-karena-disiplin-3m-turun-drastis>
- Zahara, E. (n.d.). *Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Dharmawangsa.Ac.Id. file:///C:/Users/USER/Downloads/05. Evi Zahara.pdf